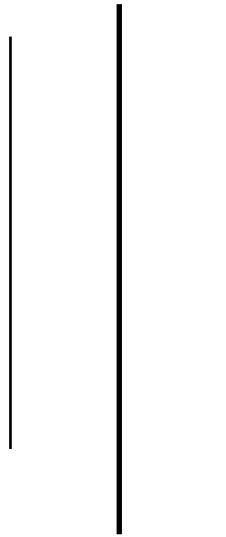




PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
2020

Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Kode Pos 52312 Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0284) 321029 Faks (0284) 321287
Email : bpkadkabpemalang@gmail.com



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 188.4 / 533 / TAHUN 2021

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

TAHUN 2021

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 368 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan bupati;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021, maka perlu dilaksanakan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;

15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja yang telah disahkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah menjadi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dijadikan dasar untuk penyusunan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 serta sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penyesuaian target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 21 September 2021



BUPATI PEMALANG,

MUKTI AGUNG WIBOWO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 188.4 / 533 /TAHUN 2021

TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

DAFTAR RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DITETAPKAN

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
12. Dinas Tenaga Kerja
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Pertanian
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21. Satuan Polisi Pamong Praja
22. Bappeda
23. Bapenda
24. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
25. Badan Kepegawaian Daerah
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28. Kecamatan Pemalang
29. Kecamatan Taman
30. Kecamatan Petarukan
31. Kecamatan Ampelgading
32. Kecamatan Comal
33. Kecamatan Ulujami
34. Kecamatan Bodeh
35. Kecamatan Bantarbolang
36. Kecamatan Randudongkal
37. Kecamatan Moga
38. Kecamatan Warungpring
39. Kecamatan Pulosari
40. Kecamatan Watukumpul
41. Kecamatan Belik

BUPATI PEMALANG,



Mukti Agung Wibowo

MUKTI AGUNG WIBOWO



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 050/ 419 / TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 360 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah, menyebutkan bahwa Perangkat daerah Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perangkat Daerah menyusun perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perubahan anggaran dan penyesuaian target kegiatan pada Tahun 2021, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tat Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
 27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang

- Tahun 2018 – 2038;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.
 31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 serta sebagai acuan dalam penentuan target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 September 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



Drs.M.A.PUNTODEWO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19640327 199201 1 002

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan pada BPKAD yang masuk perubahan APBD Tahun anggaran 2021. Perubahan Renja BPKAD Tahun 2021 dirancang berdasarkan perubahan anggaran yang mendahului perubahan APBD Tahun 2021 termasuk data refocusing anggaran serta rancangan perubahan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

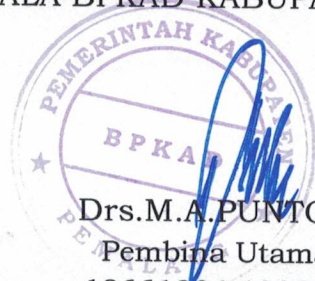
Perubahan Renja Tahun 2021 tidak bergeser dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BPKAD Tahun 2016 - 2021 dengan tetap mempedomani Rancangan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026. Peningkatan Pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kemudahan akses data menjadi tujuan BPKAD dengan sasaran peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Perubahan Renja Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 dan tidak terlepas dari pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan pada semester 1 tahun anggaran 2021. Pelaksanaan program kegiatan tahun 2021 dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Pemalang. BPKAD merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai posisi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, mendukung misi Kabupaten Pemalang yang ke-6 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Perubahan Renja Tahun 2021 disusun oleh perangkat daerah sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan pada Tahun 2021. Perubahan Renja BPKAD Tahun 2021 merupakan dasar untuk menyusun perubahan rencana kerja anggaran (RKA) BPKAD Tahun 2021 yang selanjutnya akan disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BPKAD Tahun Anggaran 2021 yang tetap berpedoman pada RKPD Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Pemalang, 23 September 2021

KEPALA BPKAD KABUPATEN PEMALANG



Drs.M.A.PUNTODEWO,
Pembina Utama Muda
19661224 199203 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG NOMOR 188.4/533/ TAHUN 2021 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021	ii
KEPUTUSAN KEPALA BPKAD NOMOR 050/ 419 / TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENJA BPKAD TAHUN 2021	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	9
2.1 Analisis Gambaran Pelayanan BPKAD Kabupaten...	9
2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja BPKAD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021	40
2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	55
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD	61
BAB IV PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Gambaran Pelayanan Umum BPKAD	10
Tabel 2.2 : Persandingan Program Kegiatan Lama (Permendagri 13/2006) dengan Program Kegiatan Baru (Permendagri 90/2019).....	16
Tabel 2.3 : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2021 Periode Pelaksanaan : TW II.....	41
Tabel 3.1 : Rencana Kerja dan Pendanaan BPKAD Tahun 2021	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dokumen perencanaan tahunan BPKAD yang memuat program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan telah dievaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II pada Tahun Anggaran 2021. Perubahan Renja BPKAD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang merupakan peralihan periode kepemimpinan Kepala Daerah dari periode tahun 2016-2021 ke periode tahun 2021-2026. Sehingga perubahan Renja BPKAD berpedoman pada Renstra BPKAD Tahun 2016-2021, Rancangan Renstra BPKAD Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.
2. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 perlu disusun karena adanya perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yaitu Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri 77 Tahun 2020 serta perubahan regulasi teknis pengelolaan keuangan terkait nomenklatur klasifikasi dan kodifikasi program, kegiatan, sub kegiatan dan akun yang diatur dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kemendagri 050-3708 Tahun 2020.
3. Perubahan Renja Tahun 2021 merupakan pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2021;
4. Perubahan Renja Tahun 2021 dapat digunakan sebagai instrument untuk mengidentifikasi permasalahan, kendala, hambatan dan solusi pelaksanaan program kegiatan yang belum tercapai target kinerjanya serta memberikan peluang untuk mengubah prioritas kinerja sesuai dengan kondisi existing yang dihadapi oleh perangkat daerah maupun kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap kebijakan perangkat daerah.
5. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 sangat dipengaruhi dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan Covid-19 beserta dampaknya serta kebijakan Pemerintah Daerah terkait

penyediaan dana dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diwarnai dengan rasionalisasi anggaran yang disebabkan realisasi SILPA pada tahun sebelumnya tidak sesuai dengan target SILPA yang ditetapkan. Kondisi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya penghematan belanja daerah sehingga Pemerintah Daerah tidak bisa mengelak berada pada kondisi “program follow money” bukan “money follow program”. Rasionalisasi anggaran kegiatan operasional khususnya Belanja Modal, Belanja Pegawai seperti Honorarium PNS, Uang lembur, Honorarium pengadaan Barang/Jasa, Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta Belanja Perjalanan Dinas merupakan upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam mensikapi kondisi keuangan Pemda Pemalang pada Tahun 2021. Kebijakan Pemerintah terkait dengan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak pada fokus pelaksanaan kegiatan yang dialokasikan melalui Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Pemalang. Belanja Tidak Terduga yang pelaksanaan kegiatannya dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang, ditujukan untuk monitoring pelaksanaan PPKM di Kabupaten Pemalang, Penyediaan sarana prasarana pendukung di lokasi isolasi mandiri, pemantauan pemberlakuan jam malam, penyemprotan desinfektan, penanganan pemakaman masyarakat terpapar covid-19 serta pemberian logistik bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di Gedung Baru DPRD Kabupaten Pemalang, yang digunakan sebagai tempat isolasi mandiri bagi masyarakat yang terpapar covid-19 tanpa komorbid. Salah satu kebijakan Pemerintah terkait Covid-19 yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah penyediaan alokasi anggaran untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan. Alokasi Anggaran Insentif Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pemalang dilakukan dengan penggeseran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Operasional Dinas Kesehatan.

Perubahan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2021 masih diwarnai dengan semangat efisiensi anggaran dan pembatasan kegiatan tatap muka pada saat pelaksanaan kegiatan. Penerapan Work From Home (WFH) mendukung dilakukannya efisiensi terkait belanja makan minum, Alat Tulis Kantor dan Perjalanan Dinas. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan cara tatap muka diganti dengan cara Daring/Virtual, merupakan upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD yang tetap dijalankan walaupun dengan kondisi anggaran yang sangat efisien.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kode dan nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang tercantum pada Permendagri nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Pada Tahun Anggaran 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya mengelola 3 program 14 kegiatan dan 83 sub kegiatan.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja-PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja-PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana tercantum dalam regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016 Nomor 41). Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 bahwa yang melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun fungsi yang diselenggarakan BPKAD dalam melaksanakan tugas tersebut adalah :

- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021, diselaraskan dengan dokumen perencanaan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.
3. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 serta Rancangan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tat Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah

- Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.
 32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021

- a) Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2021 yang merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.
- b) Mewujudkan Sinergitas Rencana kerja Program dan Kegiatan BPKAD pada perubahan APBD Tahun 2021 dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021 – 2026.
- c) Sebagai pedoman dalam mengevaluasi ketersediaan anggaran untuk mencukupi pelaksanaan program kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang terinci dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021;
- b. Menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi sehingga tercipta sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja;
- d. Menjadi acuan bagi seluruh bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang karena memuat arah dan kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2021.
- e. Sebagai sarana penyesuaian atas ditetapkannya regulasi baru dalam pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA BPKAD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1. Analisis Gambaran Pelayanan BPKAD Kabupaten Pematang Jaya.
- 2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja BPKAD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021
- 2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada perubahan Renja BPKAD Tahun 2021

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2021

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan BPKAD Kabupaten Pemalang.

Pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021. Mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran Daerah. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang adalah “*Meningkatkan Kinerja Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah*” yang mendukung sasaran daerah yaitu Mewujudkan Birokrasi yang Akuntabel. Tujuan BPKAD tersebut mempunyai 2 (dua) indikator yaitu Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Persentase Pemanfaatan Daerah. Kedua indikator tersebut ditetapkan sebagai tolok ukur pelaksanaan kinerja BPKAD dari sisi pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Untuk mewujudkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, ditetapkan 2 sasaran BPKAD yang terkait dengan pelaksanaan fungsi yang menjadi core bisnis BPKAD dan sasaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penunjang di BPKAD. Kedua sasaran BPKAD dengan masing-masing indikatornya adalah sebagai berikut :

1. *Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.*

Indikator Sasaran 1 :

- Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran
- Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran
- Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah
- Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki

2. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*

Indikator Sasaran 2 :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Secara rinci Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program beserta targetnya tercantum pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Gambaran Pelayanan Umum BPKAD

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
Peningkatan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah	1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Target : Bobot Nilai 80	Jumlah Bobot Nilai dari semua komponen Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran. Target : Bobot Nilai 15	Jumlah Nomenklatur Program dan Anggaran Program yang tercantum dalam APBD yang sesuai dengan yang tercantum dalam KUA PPAS dibanding Jumlah keseluruhan Program	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai Ketentuan. Target : 100%	Sesuai Pasal 104 PP Nomor 12 Tahun 2019, penyampaian Raperda APBD paling lambat 1 Oktober Tahun sebelumnya. (Menyampaikan tepat waktu = 100%, Tidak tepat waktu = 50%, Tidak Menyampaikan = 0%)
							Presentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (60%)	Sesuai Permendagri 18 Tahun 2020
				2. Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran Target : Bobot Nilai 20	Jumlah Skor penyerapan anggaran belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bansos, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja barang/jasa, belanja tidak terduga dan belanja modal dibagi jumlah jenis belanja	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan (100%)	Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD: Jumlah berkas pengajuan SP2D dari SKPD yang diproses dalam waktu 3 hari setelah berkas diterima BPKAD dibanding jumlah seluruh berkas pengajuan SP2D yang diterima BPKAD, Diproses sesuai SOP (3 hari)= 100% Diproses tidak sesuai SOP = 50% Tidak diproses = 0%

				3. Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah Target : Bobot Nilai : 15	Jumlah Hasil Penghitungan Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas Jangka Pendek dan Solvabilitas Jangka Panjang dibagi Jumlah Jenis Komponen Kondisi Keuangan Daerah.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan (100%)	Dasar Regulasi : PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 127 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
							Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan (100%)	Dasar Regulasi : PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : LKD disampaikan pada Bulan Maret Tahun berikutnya Tepat Waktu = 100% Tidak Tepat Waktu = 50% Tidak Disampaikan = 0%
	2. Persentase Pemanfaatan BMD			4. Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki (Target : 50 %)	Jumlah BMD yang dimiliki dibanding dengan jumlah BMD yang dikuasai	Program Pengelolaan BMD	Persentase tertib Administrasi Penatausahaan BMD	

Indikator sasaran BPKAD menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Tahun 2021-2026. Sasaran BPKAD didukung 3 program yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 Kegiatan dan 31 sub kegiatan
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 8 sub kegiatan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 kegiatan dan 44 sub kegiatan.

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. Menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam mencatat, membukukan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya.
2. Menyusun petunjuk teknis, sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Menyusun Rancangan Perda tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menyusun Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD;
5. Menyusun Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
6. Menyusun Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
7. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah;
8. Melakukan upaya pengamanan aset daerah dengan sertifikasi tanah milik Pemkab Pematang Jaya dan pemasangan papan identitas di atas tanah milik Pemkab Pematang Jaya;
9. Melakukan pembayaran PBB atas aset tanah milik Pemkab Pematang Jaya;
10. Menginventarisasi RKB dan RKP dari masing-masing SKPD serta mendistribusikan BMD ke SKPD sesuai usulan kebutuhan;
11. Menyusun Keputusan KDH tentang Penunjukkan Pengurus Barang dan Status Pengguna Barang;

12. Menyusun Laporan Semesteran BMD selaku SKPD dan menyusun Laporan Semesteran BMD Konsolidasi selaku SKPKD serta menyusun Laporan Tahunan BMD Konsolidasi;
13. Melaksanakan pemindahtanganan dan Penghapusan BMD atas usulan SKPD dan kebijakan pengguna BMD;
14. Mengelola penerimaan sewa tanah dan gedung, penerimaan penjualan bongkaran dan penerimaan atas penjualan kendaraan dinas roda dua/empat termasuk menyusun laporan pendapatannya;
15. Melakukan Monitoring atas pemanfaatan aset daerah;
16. Menyusun regulasi terkait Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah;
17. Melakukan Pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola keuangan di SKPD secara berkala;
18. Mengelola Kerugian Daerah dan memantau tindak lanjutnya sesuai ketentuan;
19. Melakukan Bimtek/Sosialisasi/Pendampingan kepada Pengurus Barang guna meningkatkan kompetensi pengurus barang selaku pengelola BMD di SKPD;
20. Mengatur ketersediaan dana Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
21. Mengelola cash idle untuk meningkatkan PAD Pemkab Pematang Jaya melalui pendapatan jasa giro dan bunga deposito serta menyusun Laporan Pendapatannya secara berkala;
22. Menginventarisasi dan menyimpan bukti-bukti kepemilikan BMD, bukti-bukti penyertaan modal dan bukti-bukti penempatan deposito;
23. Menyusun Laporan sebagai bahan rancangan KUA PPAS;
24. Menerbitkan SP2D Belanja dan Pembiayaan;
25. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi;
26. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kasesuai ketentuan yang berlaku;
27. Melakukan pencatatan register Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
28. Mengelola Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Gaji PNSD se-Kabupaten Pematang Jaya beserta tunjangan kinerjanya;
29. Mengelola Belanja Tidak Langsung PPKD;
30. Mengelola penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
31. Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Keputusan Otorisasi;
32. Mempersiapkan bahan pertimbangan pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
33. Menyusun Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;

34. Mengelola, meningkatkan dan mengembangkan sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD;
35. Memfasilitasi pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan untuk Perangkat Daerah.

Untuk mendukung pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengelola Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Transfer, Belanja Tidak Terduga dan Pendapatan.

1. Belanja Operasional

Klasifikasi dan Nomenklatur Belanja Operasional disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Sedangkan pagu anggaran Belanja Operasional disesuaikan dengan ketentuan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran-Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021.

2. Belanja Modal

Belanja Modal yang dikelola BPKAD berupa pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan dan perlengkapan kantor serta pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan dan peralatan Gedung kantor. Sesuai dengan perubahan kebijakan KUA PPAS Tahun 2021, Belanja modal pada BPKAD difokuskan kecuali pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2021-2024.

3. Belanja Transfer

Belanja Transfer yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa masuk pada sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa terdiri dari ADD, Dana Desa, PTSL, TMMD, Bantuan Keuangan Hasil Musrenbang dan Bantuan Keuangan Khusus yang mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masuk pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

4. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga masuk pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak. Pada Tahun 2021, Belanja Tidak Terduga selain ditujukan untuk mengatasi hal-hal yang bersifat darurat dan mendesak, belanja ini juga ditujukan untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak pandemi covid-19 di Kabupaten Pematang Jaya, seperti : Pelaksanaan monitoring PPKM, Jam Malam, Penyediaan Operasional Posko Covid-19, Penyediaan Sarana Prasarana isolasi Mandiri yang terpusat di Gedung DPRD baru yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19, Penyemprotan Desinfektan dan lain sebagainya.

5. Pendapatan

Pendapatan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Pendapatan yang masuk dalam Kategori Lain-Lain PAD yang sah yaitu Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin yang terdiri dari Hasil Penjualan Kendaraan Dinas dan Hasil Penjualan Alat Kantor, Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan, Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya, Hasil Sewa BMD, Jasa Giro dan Pendapatan Bunga Deposito.

Pada Tahun 2021, terdapat perubahan regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Menindaklanjuti pergantian regulasi pengelolaan keuangan daerah tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan mapping program kegiatan sesuai ketentuan dimaksud. Secara rinci mapping program kegiatan dan pendanaan pada perubahan APBD Tahun 2021 di BPKAD sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Persandingan Program Kegiatan lama (Permendagri 13/2006) dengan Program Kegiatan Baru (Permendagri 90/2019)

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK			
NO	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING							
	4	04	08	01			Urusan Penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan													
	4	04	08	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN													
1	4	04	08	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Penyediaan Jasa surat Menyurat	- Jumlah surat masuk, surat keluar, nota dinas dan dokumen surat menyurat lainnya yang tercatat dan terdistribusi secara tertib selama setahun	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.08	01	7.800 surat/ Notdin	18.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	4	04	08	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah kebutuhan Air, Telephone, Listrik, Internet dan Cloud selama setahun	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.08	02	4 jenis	660.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3	4	04	08	01	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan BMD	3	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	- Jumlah alat berat dan kendaraan dinas roda empat yang dijaminikan selama setahun - Jumlah Laporan Pemindahtanganan dan Penghapusan - Jumlah Laporan Monitoring Pemanfaatan BMD - Jumlah SPT PBB tanah milik Pemkab yang terbayar	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5	02	03	2.01	10	185 Unit, 4 Laporan, 75 SPT	620.000.000	Kasubid Aset Daerah

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK			
NO	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING							
4	4	04	08	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 perorangan dan jabatan milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.09	01	50 Unit	15.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
								5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	- Jumlah STNK Kendaraan Operasional Dinas Roda milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.09	02	3 Unit	3.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	4	04	08	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/Bendahara - Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS	Adimistrasi Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.02	02	25 SK	40.000.000	Kasubag Bina Program dan Keuangan
6	4	04	08	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (K3 dan alat alat kebersihan) yang tersedia selama setahun	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.08	04	4 Orang	168.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
								8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah Jasa Penataan Arsip	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.06	10	8 Orang	8.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK				
NO	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING							
7	4	04	08	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Perlatan Kerja	9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah peralatan kerja (Service Komputer, printer, laptop, mesin foto copy dll) yang diperbaiki selama setahun	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.08	03	30 Unit	25.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	4	04	08	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama setahun Jumlah Makanan dan Minuman harian dan kegiatan yang tersedia	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.06	04	32 Jenis	120.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9	4	04	08	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia selama setahun	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.06	05	11 Jenis	50.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10	4	04	08	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Perbaikan Instalasi Listrik dan Pembelian Alat Penerangan yang terlaksana selama setahun	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.06	01	12 kegiatan	7.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
11	4	04	08	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (white board, mesin ketik, mesin fax, mesin foto copy) yang terlaksana selama setahun	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.06	02	5 unit	10.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
								14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.06	03	10 Jenis	5.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
								15	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pembelian Bendera dan umbul umbul	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.06	07	50 buah	5.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK				
NO	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING							
12	4	04	08	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Biaya Berlangganan Surat Kabar/Majalah dan pembelian buku-buku referensi/regulasi untuk keperluan dinas) yang terlaksana selama setahun	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.06	06	12 kegiatan	15.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
13	4	04	08	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah jenis Penyediaan Makanan dan Minuman rapat dan Makan Minum Tamu yang terlaksana selama setahun	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.06	08	2 Jenis	79.248.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
14	4	04	08	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah yang terlaksana dalam rangka koordinasi dan konsultasi selama setahun	Administrasi Umum Pemda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.06	09	50 kegiatan	200.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	4	04	08	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR													
15	4	04	08	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Korden, Lambang Garuda, papan pengumuman dll) yang terlaksana selama setahun	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.07	11	10 buah	5.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK			
NO	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING							
16	4	04	08	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Pengadaan CCTV, AC, Genset, penangkal petir dll) selama setahun	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.07	10	3 unit	25.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
17	4	04	08	01	02	10	Pengadaan Meubeluer	21	Pengadaan Meubeluer	- Jumlah Pengadaan Meubeleur selama setahun	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.07	05	3 unit	10.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18	4	04	08	01	02	11	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.07	06	9 Unit	150.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
19	4	04	08	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	23	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.09	09	2 lokal	100.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
20	4	04	08	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	24	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	- Jumlah Mobil Operasional dan Mobil Jabatan yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.09	07	53 Unit	110.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
21	4	04	08	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional													
22	4	04	08	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan perlengkapan gedung kantor (Laundry Korden, Bendera, perbaikan papan nama instansi, perbaikan Papan DUK dll) yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.09	11	12 kegiatan	5.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK			
NO	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING							
23	4	04	08	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	26	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor (AC, CCTV, Genset, Penangkal Petir dll) yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.09	10	15 unit	25.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
24	4	04	08	01	02	29	Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleur	27	Pemeliharaan Meubeleur	- Jumlah Meubeleur yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.09	05	5 unit	5.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
25	4	04	08	01	02	30	Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer dan Perlengkapannya	28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terlaksana pemeliharannya selama setahun (Service Komputer, Mesin FC, Mesin Fax, Telephone, LCD dll)	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.09	06	30 unit	25.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
26	4	04	08	01	02	45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Software dan Sistim Informasi	Masuk ke sub kegiatan 5.02.02.2.05.02												
	4	04	08	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR													
27	4	04	08	01	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	'- Jumlah ASN yang mengikuti Bintek/Seminar/ Workshop/Diklat	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.05	10	60 Orang	200.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK				
NO	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING							
	4	04	08	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN													
28	4	04	08	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (TAPKIN)	30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah LKjIP Perangkat Daerah - Jumlah Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan - Jumlah Laporan Realisasi Kinerja triwulanan - Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang tersusun	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.01	06	21 Laporan	3.000.000	Kasubag Bina Program dan Keuangan
29	4	04	08	01	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	31	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran perangkat daerah yang tersusun - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah - Laporan Keuangan Triwulanan Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran BPKAD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.02	07	39 laporan	3.000.000	Kasubag Bina Program dan Keuangan
								32	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Laporan Prognosis Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.02	08	1 Laporan	3.000.000	Kasubag Bina Program dan Keuangan

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK				
NO	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING							
30	4	04	08	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah - Jumlah LPPD Perangkat Daerah - Jumlah LKPJ Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.02	05	3 Laporan	5.000.000	Kasubag Bina Program dan Keuangan
31	4	04	08	01	06	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi	34	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Konsolidasi, Laporan Keuangan Bulanan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Triwulanan Konsolidasi yang tersusun selama setahun	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.03	03	14 Laporan	35.000.000	Kasubid Akuntansi dan Pelaporan
32	4	04	08	01	06	07	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Konsolidasi	35	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan Pemda Akhir Tahun yang tersusun	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.03	04	14 Laporan	65.000.000	Kasubid Akuntansi dan Pelaporan
33	4	04	08	01	06	08	Penyusunan Rekonsiliasi Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	36	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD dan PPKD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.03	02	48 Laporan	30.000.000	Kasubid Analisa Data dan Pengembangan Sistem
34	4	04	08	01	06	09	Monitoring Pelaporan dan Evaluasi	37	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulanan (Level Eselon 2,3 dan 4) - Jumlah Laporan Evaluasi Realisasi RKPD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.01	07	60 Laporan	2.000.000	Kasubag Bina Program dan Keuangan

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK				
NO	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING							
								38	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen dan laporan sebagai bahan tanggapan pemeriksaan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.02	06	10 Dokumen	3.000.000	Kasubag Bina Program dan Keuangan
	4	04	08	01	09		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD													
35	4	04	08	01	09	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	39	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.01	01	3 Dokumen	4.000.000	Kasubag Bina Program dan Keuangan
								40	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.01	02	70 Dokumen	1.000.000	Kasubag Bina Program dan Keuangan
								41	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.01	03	100 Dokumen	2.000.000	Kasubag Bina Program dan Keuangan
								42	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.01	04	70 Dokumen	6.000.000	Kasubag Bina Program dan Keuangan
								43	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.01	05	100 Dokumen	8.000.000	Kasubag Bina Program dan Keuangan

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK			
NO	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING							
	4	04	08	01	15		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													
36	4	04	08	01	15	03	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah	44	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	Jumlah Perbup Kebijakan Akuntansi Pemda yang tersusun selama setahun	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.03	09	1 Perbup	35.000.000	Kasubid Analisa Data dan Pengembangan Sistem
37	4	04	08	01	15	04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	45	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD yang tersusun selama setahun	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.02	10	1 Perbup	90.000.000	Kasubid Belanja Langsung
38	4	04	08	01	15	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	46	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.01	07	2 Dokumen	435.000.000	Kasubid Penyusunan Evaluasi Anggaran
39	4	04	08	01	15	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD													

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK			
NO	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING							
40	4	04	08	01	15	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	47	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan Perubahan APBD	Jumlah Raperda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Peraturan Perubahan APBD yang tersusun	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.01	08	5 Dokumen	435.000.000	Kasubid Penyusunan dan Evaluasi Anggaran
41	4	04	08	01	15	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Peraturan Perubahan APBD													
42	4	04	08	01	15	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	48	Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun selama setahun	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.03	05	2 Dokumen	475.000.000	Kasubid Akuntansi dan Pelaporan
43	4	04	08	01	15	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													
44	4	04	08	01	15	15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	49	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah personil pengelola keuangan pada perangkat daerah yang mengikuti Pembinaan/Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.02	11	75 orang	73.850.000	Kasubid BL

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK					
NO	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING								
45	4	04	08	01	15	16	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang	50	Pengamanan BMD	- Jumlah Tanah Milik Pemda yang terproses sertifikatnya - Jumlah Tanah Pemda yang terpasangi Papan Identitas Tanah Pemda (200 sertifikat, 100 papan)	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5	02	03	2.01	07	300 Bidang	710.000.000	Kasubid Aset Daerah	
								51	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5	02	03	2.01	09	2 Laporan	25.000.000	Kasubid Aset Daerah	
46	4	04	08	01	15	21	Pembayaran PBB aset Daerah/BMD	52	Penilaian BMD	Jumlah Aset yang dinilai	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5	02	03	2.01	08	10 unit	50.000.000	Kasubid Aset Daerah	
47	4	04	08	01	15	22	Pendistribusian Barang Milik daerah (BMD)		Masuk ke sub kegiatan 5.02.03.2.01.10												
48	4	04	08	01	15	23	Penetapan Status pengguna BMD, SK Pengurus Barang, RKB dan RKPBU	53	Penyusunan perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBM yang tersusun selama setahun	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5	02	03	2.01	03	2 dokumen	30.000.000	Kasubid Aset Daerah	
								54	Penatausahaan BMD	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pengguna BMD dan Pengurus BMD	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5	02	03	2.01	05	4 Dokumen	15.000.000	Kasubid Aset Daerah	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK					
NO	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING								
49	4	04	08	01	15	24	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	55	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	- Jumlah Laporan Bulanan BMD SKPD - Jumlah Laporan Triwulanan BMD SKPD - Jumlah Laporan Semesteran BMD SKPD - Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD SKPD	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KAB/KOTA	5	02	01	2.03	05	17 laporan	5.000.000	Kasubag Bina Program dan Keuangan	
50	4	04	08	01	15	25	Penyelesaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Masuk ke sub kegiatan 5.02.03.2.01.10													
51	4	04	08	01	15	26	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD	Masuk ke sub kegiatan 5.02.02.2.03.02													
52	4	04	08	01	15	27	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	56	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda	- Jumlah Manual Book dan Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.03	10	2 Dokumen	50.000.000	Kasubid Analisa Data dan Pengembangan Sistem	
53	4	04	08	01	15	35	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	57	Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang mengikuti Bimtek operasional sistem penyusunan Laporan Keuangan (SIMDA)	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemda Lingkup Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.05	03	75 Orang	150.000.000	Kasubid Analisa Data dan Pengembangan Sistem	
54	4	04	08	01	15	54	Pengelolaan Kerugian Daerah	58	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TP/TGR	Jumlah Laporan Penyelesaian TP/TGR	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.03	07	2 Laporan	30.000.000	Kasubid Belanja Langsung	
55	4	04	08	01	15	56	Pemantauan, pemanfaatan aset/BMD	Masuk ke 5.02.03.2.01.10													

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK			
NO	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING							
56	4	04	08	01	15	57	Penyusunan Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi)	59	Penyusunan Laporan BMD	- Jumlah Laporan BMD Akhir Tahun Konsolidasi - Jumlah Laporan Semesteran BMD Konsolidasi - Jumlah Laporan Bulanan dan Triwulanan BMD Konsolidasi	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5	02	03	2.01	12	14 Laporan	40.000.000	Kasubid Aset Daerah
57	4	04	08	01	15	58	Pengelolaan Kas Daerah	60	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah - Jumlah Laporan Mutasi Deposito - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Jasa Giro dan Bunga Deposito	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.02	01	48 Laporan	110.000.000	Kasubid Belanja Tidak Langsung
58	4	04	08	01	15	59	Penyusunan bahan rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS	61	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Laporan Data Kapasitas Anggaran Pendapatan (Penetapan dan Perubahan)	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.01	10	2 Laporan	30.000.000	Kasubid Perencanaan Anggaran
								62	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Data Kapasitas Anggaran Belanja Daerah (Penetapan dan Perubahan)	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.01	11	2 Laporan	30.000.000	Kasubid Perencanaan Anggaran
								63	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Laporan Data Kapasitas Anggaran Pembiayaan (Penetapan dan Perubahan)	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.01	12	2 Laporan	30.000.000	Kasubid Perencanaan Anggaran
								64	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.01	01	1 Dokumen	200.000.000	Kasubid Perencanaan Anggaran

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK			
NO	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING							
								65	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.01	02	1 Dokumen	50.000.000	Kasubid Perencanaan Anggaran
59	4	04	08	01	15	62	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD oleh SKPKD	66	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Pengadaan Mobil untuk Operasional pejabat pada Perangkat Daerah (Untuk Ka BPBD, Kadin Kesbangpol, 9 operasional eselon 3)	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.07	01	11 unit	3.060.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
								67	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (1 Hi Lux dan 1 utk operasional Dekranasda)	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.07	02	2 Unit	510.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
60	4	04	08	01	15	64	Penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan													
61	4	04	08	01	15	65	Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	68	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	- Jumlah Laporan Posisi Kas - Jumlah SP2D yang diterbitkan - Jumlah Dokumen SKPP yang diterbitkan (240 Lap Poskas, 5.000 SP2D, 500 SKPP)	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.02	07	5740 Dokumen	294.584.000	Kasubid Belanja Tidak Langsung

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK				
NO	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING							
62	4	04	08	01	15	66	Penyusunan Dokumen Penghentian Pembayaran Gaji PNSD		Masuk pada Sub Kegiatan 5.02.02.2.02.05											
63	4	04	08	01	15	67	Penyusunan Dokumen Pendukung Pembayaran Gaji PNSD		Masuk pada Sub Kegiatan 5.02.02.2.02.05											
64	4	04	08	01	15	68	Peningkatan Kompetensi Pengelola Aset Daerah	69	Pembinaan Pengelolaan BMD	- Jumlah personil yang mengikuti Sosialisasi/Bimtek pengelola BMD	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5	02	03	2.01	13	75 Orang	100.000.000	Kasubid Aset Daerah
65	4	04	08	01	15	69	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	70	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dibuat dan dipelihara	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemda Lingkup Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.05	02	2 SIM	150.000.000	Kasubid Analisa Data dan Pengembangan Sistem
66	4	04	08	01	15	70	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan LKT	71	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Jumlah Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) yang disusun - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi yang disusun - Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dana TPG - Jumlah Laporan Realisasi DAK Fisik (12 LKT, 4 BA Rekon Bagi Hasil Pajak Prop, 4 Laporan Rekon TPG, 12 Laporan Realisasi DAK Fisik)	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.02	05	32 Laporan	50.000.000	Kasubid Belanja Langsung

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK				
NO	KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKENING							
67	4	04	08	01	15	71	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan PPKD, Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan	72	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	- Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PPKD - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran BPKAD - Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.02	09	72 Laporan	15.000.000	Kasubag Bina Program dan Keuangan
68	4	04	08	01	15	72	Penerbitan surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas	73	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan anggaran Kas dan SPD	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas perangkat daerah yang diterbitkan selama setahun (150 SPD, 150 Anggaran Kas)	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.02	03	300 Dokumen	30.000.000	Kasubid Perencanaan Anggaran
								74	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.01	13	120 orang	150.000.000	Kasubid Evaluasi Anggaran
								75	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang diverifikasi	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.01	03	5000 Dokumen	25.000.000	Kasubid Evaluasi Anggaran
								76	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.01	04	5000 Dokumen	25.000.000	Kasubid Evaluasi Anggaran

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							OUTPUT KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK				
NO	KODE REKONING						PROGRAM DAN KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE REKONING							
								77	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.01	05	5000 Dokumen	100.000.000	Kasubid Evaluasi Anggaran
								78	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.01	06	5000 Dokumen	100.000.000	Kasubid Evaluasi Anggaran
								79	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan (Gaji = 3.582.442.000, Tunjangan = 3.534.899.000)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.02	01	50 orang	7.117.341.000	Kasubag Bina Program dan Keu
								80	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuanagn SKPD	Jumlah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	5	02	01	2.02	03		195.000.000	Kasubag Bina Program dan Keu
								81	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.04	08		494.571.067.000	Kasubid Belanja Tidak Langsung
								82	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.04	09		20.000.000.000	Kasubid Belanja Tidak Langsung
								83	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	02	02	2.04	10		10.352.073.000	Kasubid Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut, Program dan Kegiatan yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya pada Tahun 2021 sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 kegiatan 44 Sub Kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target output 2 Dokumen;
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA –SKPD dengan target output 70 Dokumen;
 - 1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD dengan target output 100 Dokumen;
 - 1.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD dengan target output 70 Dokumen;
 - 1.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD dengan target output 100 Dokumen;
 - 1.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target output 21 Dokumen;
 - 1.1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target output 60 Dokumen.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan dengan target output 48 orang;
 - 1.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target output 25 SK;
 - 1.2.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target output 64 Dokumen;
 - 1.2.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target output 3 laporan;
 - 1.2.5 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan target output 10 Dokumen.
 - 1.2.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan target output 39 Laporan;

- 1.2.7 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan target output 1 Laporan.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD dengan target output 17 Laporan.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1.4.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target output 60 orang.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 10 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan dengan target output 12 kegiatan;
 - 1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target output 5 unit;
 - 1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan target output 10 Jenis;
 - 1.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target output 32 Jenis;
 - 1.5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target output 11 Jenis;
 - 1.5.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target output 12 Kegiatan;
 - 1.5.7 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material dengan target output 50 buah;
 - 1.5.8 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target output 2 Jenis;
 - 1.5.9 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target output 50 Kegiatan;
 - 1.5.10 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan target output 8 Orang.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target output 2 unit;
 - 1.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target output 1 unit;

- 1.6.3 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan target output 3 unit;
 - 1.6.4 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target output 9 unit;
 - 1.6.5 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target output 3 unit;
 - 1.6.6 Sub Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target output 10 Buah.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :
- 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target output 7.800 Surat/Nodin;
 - 1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target output 4 Jenis;
 - 1.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target output 30 unit;
 - 1.7.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target output 4 orang.
8. Kegiatan Pemeliharaan Brang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan yaitu :
- 1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target output 50 unit;
 - 1.8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target output 3 unit;
 - 1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan target output 5 unit;
 - 1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target output 30 unit;
 - 1.8.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dengan target output 53 unit;
 - 1.8.6 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target output 2 lokal;
 - 1.8.7 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya dengan target output 15 unit;
 - 1.8.8 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya dengan target output 12 kegiatan.

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 5 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 12 Sub Kegiatan yaitu :
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA-PPAS dengan target output 1 Dokumen;
 - 2.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS dengan target output 1 Dokumen;
 - 2.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD dengan target output 5000 Dokumen;
 - 2.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD dengan target output 5000 Dokumen;
 - 2.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD dengan target output 5000 Dokumen;
 - 2.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD dengan target output 5000 Dokumen;
 - 2.1.7 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan target output 2 Dokumen;
 - 2.1.8 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan target output 5 Dokumen;
 - 2.1.9 Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dengan target output 2 laporan;
 - 2.1.10 Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan target output 2 Laporan;
 - 2.1.11 Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan dengan target output 2 Laporan;
 - 2.1.12 Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target output 120 orang.
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :
 - 2.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan target output 48 laporan;

- 2.2.2 Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan target output 300 Dokumen;
 - 2.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan target output 32 Laporan;
 - 2.2.4 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan target output 5740 Dokumen;
 - 2.2.5 Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait dengan target output 72 Laporan;
 - 2.2.6 Sub Kegiatan penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan dengan target output 1 Perbup;
 - 2.2.7 Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target output 75 Orang.
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :
- 2.3.1 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan target output 48 Laporan;
 - 2.3.2 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan target output 14 laporan;
 - 2.3.3 Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA dengan target output 14 Laporan;
 - 2.3.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan target output 2 Dokumen;
 - 2.3.5 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TP/TGR dengan target output 2 Laporan;

- 2.3.6 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda dengan target output 1 Perbup;
 - 2.3.7 Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda dengan target output 2 Dokumen.
 - 4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :
 - 2.4.1 Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan target output 211 Desa;
 - 2.4.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan target output 50 Dokumen;
 - 2.4.3 Sub Kegiatan Pengelolaan dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota dengan target output 211 Desa.
 - 5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :
 - 2.5.1 Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah dengan target output 2 SIM;
 - 2.5.2 Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target output 75 Orang.
- III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Program ini terdiri dari 1 kegiatan 8 Sub Kegiatan yaitu :
- 1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub kegiatan yaitu :
 - 3.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD dengan target output 2 Dokumen;
 - 3.1.2 Sub Kegiatan Penatausahaan BMD dengan target output 4 Dokumen;
 - 3.1.3 Sub Kegiatan Pengamanan BMD dengan target output 232 Bidang;
 - 3.1.4 Sub Kegiatan Penilaian BMD dengan target output 10 unit;
 - 3.1.5 Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD dengan target output 2 Laporan;
 - 3.1.6 Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD dengan target output 155 unit, 4 laporan, 75 SPT, 1 paket dan 51 lokasi.
 - 3.1.7 Sub Kegiatan Penyusunan Laporan BMD dengan target output 14 laporan;
 - 3.1.8 Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD dengan target output 75 orang.

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja BPKAD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang telah melakukan penggeseran anggaran mendahului perubahan sebanyak 3 (tiga) kali penggeseran. Tujuan penggeseran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penggeseran Anggaran Mendahului Perubahan Pertama.
Penggeseran pertama dilakukan untuk mengakomodir penyesuaian alokasi anggaran Bantuan Keuangan desa yang bersifat khusus (PTSL dan TMMD), yang sebelumnya dialokasikan di Bantuan Keuangan bersifat umum.
2. Penggeseran Anggaran Mendahului Perubahan Kedua.
Penggeseran mendahului perubahan kedua untuk melaksanakan kebijakan Refocusing Anggaran (Refocusing I)
3. Penggeseran Anggaran Mendahului Perubahan Ketiga.
Penggeseran Anggaran Mendahului Perubahan Ketiga untuk melaksanakan kebijakan Refocusing Anggaran (Refocusing II)

Tabel 2.3
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2021
Periode Pelaksanaan : Triwulan II

NO	Sasaran	Kode dan Nama Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Sat	Target Renstra BPKAD pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra BPKAD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra BPKAD sampai dengan Renja BPKAD Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja BPKAD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja BPKAD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra BPKAD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja BPKAD pada Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra BPKAD s/d Tahun 2021 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab									
											7		8		9		10						11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5 x100%		16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					550.036.990.000	-	7.460	57.707.588.179	5.902	260.285.438.933	-	-	-	-	13.314	317.993.027.112	-	-	-	-					
		5	02			Bidang Keuangan					550.036.990.000	-	7.460	57.707.588.179	5.902	260.285.438.933	-	-	-	-	13.314	317.993.027.112	-	-	-	-					
		5	02	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	12.383.850.000	-	1.970	2.457.072.639	2.328	3.959.320.551	-	-	-	-	4.250	6.416.393.190	-	-	-	-					
		5	02	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	26.000.000	-	49	-	62	2.950.000	-	-	-	-	111	2.950.000	-	-	-	-					
		5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok			3	4.000.000		1	-	1	-				2	-									
		5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok			70	1.000.000		-	-	-	-				-	-									
		5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Dok			100	2.000.000		8	-	22	-				30	-									

		5	02	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	%						100 %	288.000.000	-	-	-	55	44.838.799	-	-	-	-	55	44.838.799	-	-	-	-	BPKAD
		5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 perorangan dan jabatan milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya	Unit					50	15.000.000				15	4.333.200					15	4.333.200					BPKAD
		5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	- Jumlah STNK Kendaraan Operasional Dinas Roda milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya	Unit					3	3.000.000				2	537.000					2	537.000					BPKAD
		5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Meubeleur	- Jumlah Meubeleur yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	Unit					5	5.000.000				1	364.000					1	364.000					BPKAD
		5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	Unit					30	25.000.000																BPKAD
		5	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	- Jumlah Mobil Operasional dan Mobil Jabatan yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	Unit					53	110.000.000				28	31.481.699					28	31.481.699					BPKAD
		5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	Lokal					2	100.000.000				2	710.000					2	710.000					BPKAD
		5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	Unit					15	25.000.000				5	7.287.900					5	7.287.900					
		5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan perlengkapan gedung kantor yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	Keg					12	5.000.000				2	125.000					2	125.000					

		5	02	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan	100 %					100 %	528.183.140.000	-	5.197	55.250.515.540	3.505	296.259.013.314	-	-	-	-	8.702	311.509.528.85	-	-	-	-		
		5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %					100 %	1.610.000.000	-	3.502	-	2.005	154.572.134	-	-	-	-	5.507	154.572.134	-	-	-	-		
		5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS	Dok					1	200.000.000					1	15.446.759				1	15.446.759						
		5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS	Dok					1	50.000.000										-	-						
		5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang diverifikasi	Dok					5.000	25.000.000											-	-					
		5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	Dok					5.000	25.000.000											-	-					
		5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi	Dok					5.000	100.000.000		2.500			-	11.819.000				2.500	11.819.000						
		5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Dok					5.000	100.000.000		1.000			200	6.071.000				3.000	6.071.000						
		5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun	Dok					2	435.000.000						120.605.375					120.605.375						
		5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	Dok					5	435.000.000		2			1	630.000				3	630.000						
		5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Laporan Data Kapasitas Anggaran Pendapatan (Penetapan dan Perubahan)	Lap					2	30.000.000					-					-	-						

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, capaian realisasi anggaran pada Program Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 berdasarkan pagu anggaran setelah refocusing kedua sebesar Rp. 317.993.027.112,00 dari anggaran sebesar Rp 523.694.489.501 atau 60,72 %. Dari 83 sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdapat 77 sub Kegiatan yang capaiannya dibawah 50% dan 6 sub kegiatan yang realisasi anggarannya di atas 50%. Dari 83 Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya ada 6 Sub Kegiatan yang capaiannya di atas 50% sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 yaitu diantaranya :

1. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN . Realisasi Anggaran dan output kegiatan mencapai 50,68 %. Hal ini karena merupakan Sub Kegiatan Rutin yang dilakukan setiap bulan dalam pelaksanaan penyediaan Gaji dan Tunjangan bagi ASN di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan. Realisasi Anggaran dan output kegiatan mencapai 74,96 %. Hal tersebut dilakukan karena dilakukan di Triwulan I dalam rangka Sosialisasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
3. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Realisasi Anggaran dan Output kegiatan ini telah mencapai 99,25 % Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan lelang cepat untuk kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2024.
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Realisasi Anggaran dan Output kegiatan ini telah mencapai 60.30 %.
5. Sub Kegiatan koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah. Realisasi Anggaran dan Output kegiatan ini telah mencapai 53,45 %.
6. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan. Realisasi Anggaran dan Output kegiatan ini telah mencapai 51,61 %.

Selebihnya 77 Sub Kegiatan tersebut rata-rata dilaksanakan pada Triwulan ke III sehingga capaian realisasi anggaran dan output kegiatan belum mencapai 50 %.

2.3 Penentuan Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya yaitu melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya juga melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Pematang Jaya juga melaksanakan fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).

Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Menetapkan Surat Pencairan Dana (SPD);
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan

- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Selaku BUD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), adapun fungsi PPKD tersebut sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat isu penting yang merupakan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, tetapi BPKAD telah berupaya mengambil langkah-langkah solusi sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dengan berlakunya regulasi tentang keterbukaan informasi tersebut mengharuskan BPKAD sebagai perangkat daerah pengelola keuangan dan aset untuk mempublikasikan keuangan dan aset yang dikelolanya kepada masyarakat sebatas informasi/data-data yang tidak termasuk dalam pengecualian. BPKAD dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam menyajikan data-data pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun langkah-langkah yang telah diupayakan oleh BPKAD dalam melaksanakan amanat tersebut adalah :
 - Mempublikasikan Perda APBD, Perda Perubahan APBD dan Perda Pertanggungjawaban APBD kepada publik melalui Website BPKAD (https://bpkad_pemalangkab.go.id) dan Website Pemda Kabupaten Pemalang (<https://pemalangkab.go.id>)
 - Mempublikasikan Laporan Keuangan daerah, Ringkasan APBD, Lampiran III dan IV Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ke Website BPKAD Kabupaten Pemalang.
 - Menyusun buku Laporan Keuangan Daerah, APBD dan Perubahan APBD serta lampiran-lampirannya untuk didistribusikan kepada perangkat daerah se-Kabupaten Pemalang serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
 - Secara berkala meng-upload kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang2 di BPKAD Kabupaten Pemalang

dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ke website BPKAD. Adapun kegiatan yang di upload seperti lelang kendaraan dan alat berat, fasilitasi pengelolaan keuangan kepada perangkat daerah se-Kabupaten Pemalang, desk RKA dan RKAP, desk realisasi pendapatan dan belanja daerah, desk penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis, rapat-rapat dalam rangka penyusunan regulasi pengelolaan keuangan dan lain-lain.

2. Pengamanan Aset Daerah merupakan isu strategis yang menjadi sorotan para pihak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementrian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Pengamanan Aset Daerah merupakan kegiatan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang. Kementrian Agraria dan Tata Ruang telah mengeluarkan Kebijakan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) untuk Biaya Sertifikasi Tanah Aset Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui surat Kementrian Agraria Nomor : KU.01.04/1301-100/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020. Jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang keseluruhan 1.728 bidang tanah. Sedangkan jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yang telah bersertifikasi sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 807 Bidang Tanah atau 46,7%. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mentargetkan sertifikasi tanah di Kabupaten Pemalang selesai keseluruhan pada Tahun 2023. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, mengingat kelengkapan berkas persyaratan sertifikasi tanah cukup kompleks.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPKAD telah melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- Melakukan Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Pemalang terkait percepatan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang.
 - Melaksanakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang mencatat aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yang belum bersertifikasi, untuk segera melengkapi berkas persyaratan sertifikasi tanah tersebut.
 - Melakukan pemetaan potensi sertifikasi tanah termasuk penyediaan dana pendukung proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Penyusunan APBD, perubahan APBD dan Laporan Keuangan Daerah membutuhkan ketepatan waktu dan keakuratan data baik dalam penganggaran dan realisasinya. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan sistem aplikasi yang memadai dan jaringan yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan secara on line. Adanya perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah dan diberlakukannya regulasi terkait Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menjadi sedikit kendala dalam pada penatausahaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum kompatibel digunakan sebagai system yang mengakomodir Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sehingga pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya menggunakan SIPD untuk perencanaan anggaran. Sedangkan untuk penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, masih menggunakan SIMDA Keuangan yang telah disesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*):

Kerjasama Organisasi antar bidang tidak dapat dipisahkan baik internal maupun eksternal. Sedangkan keberhasilan atau kegagalan organisasi sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya selalu menyesuaikan diri dan berupaya tetap dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang baik, internal maupun eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan Program yang telah direncanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Untuk menggunakan metode analisis SWOT, terdiri dari 4 Strategi :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
4. Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman.

A. Kekuatan (*Strengths*), berupa:

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan kelembagaan organisasi dalam Program dan kegiatan maupun pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

- Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya dan Himpunan Peraturan Bupati Pematang Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Regulasi tersebut merupakan pedoman bagi semua perangkat daerah sebagai komponen Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk bergerak dan melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mendukung visi misi Kabupaten Pemalang. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang merupakan pedoman bagi BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang digunakan sebagai petunjuk secara teknis operasional bagi seluruh personil BPKAD Kabupaten Pemalang;

- Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai dalam rangka menjalankan Organisasi, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai merupakan modal bagi pelaksanaan pencapaian tujuan;
- Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh semua unsur Pemerintah Kabupaten Pemalang, merupakan target yang harus dicapai setiap tahun oleh ASN sebagai bentuk output dari kinerja personal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
- Adanya koordinasi serta jaringan komunikasi kerja lintas Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas terkait ketersediaan anggaran untuk melaksanakan Program dan Kegiatan serta motivasi dan kemauan kerja yang tinggi.

B. Kelemahan (*Weakness*), berupa:

- Belum optimalnya koordinasi Internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas;
- Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
- Masih adanya pembagian tugas pekerjaan yang belum proposional dan penempatan pegawai yang kurang memperhatikan kompetensi, kemampuan dan ketrampilan;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang Keuangan/Akuntansi;
- Kurangnya koordinasi pada masing-masing bidang;
- Penggunaan sistem pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD yang belum terintegrasi serta penggunaan sistem perencanaan yang berbeda dengan system yang digunakan untuk penganggaran.

C. Peluang (*Opportunities*), berupa:

- Terjalannya kinerja yang baik dengan mitra kerja yaitu pihak perbankan, BUMD, KPPN, Kementerian Keuangan dan pihak lainnya;
- Dukungan yang baik dan positif dari publik terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
- Tuntutan dari masyarakat dalam hal keterbukaan informasi menjadi motivasi kerja BPKAD untuk selalu berinovasi dan berkinerja atas dasar regulasi dan ketentuan yang berlaku.
- Tercapainya opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dalam 5 (lima) tahun berturut-turut atas LKD Tahun 2016,2017,2018, 2019 dan 2020. Hal ini menjadi pemacu dan pemicu peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, agar selalu optimal, terukur, akuntabel, transparan dan reliable.

D. Tantangan (*Threats*), berupa:

- Mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah secara umum sehingga perlu penterjemahan dan penafsiran teknis yang dituangkan dalam regulasi yang merupakan kebijakan lokal pemerintah Kabupaten Pematang Jaya berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 terkait dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah menuntut respon yang cepat untuk menyesuaikan urusan program kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2021 agar sesuai regulasi tersebut serta upgrade sistem/aplikasi pengelolaan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang selama ini digunakan dalam penyusunan KUA PPAS, RKPD, RKA/RKAP/DPA/DPPA;
- Beban tugas pekerjaan semakin meningkat sebanding dengan tuntutan kinerja dan output yang optimal;
- Masih banyak pelaksana yang belum menguasai akuntansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Dokumen penganggaran yang tidak lagi memisahkan fungsi BPKAD selaku SKPD dan SKPKD sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kondisi ini membutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang memadai dalam pencatatan, pembukuan dan pelaporan transaksi keuangan, ketrampilan dalam memahami regulasi pengelolaan keuangan daerah dan mengaplikasikan transaksi keuangan pada Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Adapun Rencana Program dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada Rencana Kerja Perubahan BPKAD Tahun 2021 sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Kode Program/ Kegiatan					Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Penetapan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Satuan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		Selisih		OPD	Alasan Peruba han	
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/Berkur ang (Rp)	%			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5	02	Keuangan									550.036.990.000	523.168.109.502	(26.868.880.498)	(4,88)	BPKAD		
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Indeks Reformasi Birokrasi di BPKAD	Indeks Reformasi Birokrasi di BPKAD	nilai	53	53	12.383.850.000	9.161.582.502	(3.222.267.498)	(26,02)	BPKAD		
						Nilai SAKIP di BPKAD	Nilai SAKIP di BPKAD	nilai	60,01	60,01							
5	02	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	26.000.000	23.503.100	2.496.900	9,60	BPKAD		
5	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	4.000.000	3.536.000	(464.000)	(11,6)	BPKAD	
5	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen	70	70	1.000.000	399.000	(601.000)	(60,10)	BPKAD	
5	02	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	100	100	2.000.000	3.000.000	1.000.000	50,00	BPKAD	
5	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	Dokumen	70	70	6.000.000	3.018.100	(2.981.900)	(49,70)	BPKAD	
5	02	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	Dokumen	100	100	8.000.000	12.000.000	4.000.000	(50)	BPKAD	

5	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah LKJIP Perangkat Daerah - Jumlah Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan - Jumlah Laporan Realisasi Kinerja triwulanan - Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang tersusun	- Jumlah LKJIP Perangkat Daerah - Jumlah Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan - Jumlah Laporan Realisasi Kinerja triwulanan - Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang tersusun	Laporan	21	21	3.000.000	1.550.000	(1.450.000)	(48,33)	BPKAD	
5	02	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulanan (Level Eselon 2,3 dan 4) - Jumlah Laporan Evaluasi Realisasi RKPD	- Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulanan (Level Eselon 2,3 dan 4) - Jumlah Laporan Evaluasi Realisasi RKPD	Laporan	60	60	2.000.000	0	(2.000.000)	(100)	BPKAD	
5	02	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jenis	7	7	7.012.850.000	6.180.209.000	(832.641.000)	(11,87)	BPKAD	
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan	orang	48	48	6.763.850.000	6.165.434.000	(598.416.000)	(8,85)	BPKAD	
5	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/Bendahara - Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS	- Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/Bendahara - Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS	SK	25	25	40.000.000	14.000.000	(26.000.000)	(65,00)	BPKAD	
5	02	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	- Jumlah Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala BPKAD terkait Pengeluaran Keuangan - Jumlah Berkas yang	- Jumlah Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala BPKAD terkait Pengeluaran Keuangan - Jumlah Berkas yang	Dokumen	64	64	195.000.000	0	(195.000.000)	(100)	BPKAD	

							diverifikasi (20 SK, 44 Berkas)	diverifikasi (20 SK, 44 Berkas)											
5	02	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun, LPPD dan LKPJ Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun, LPPD dan LKPJ Perangkat Daerah	Laporan	3	3	5.000.000	775.000	(4.225.000)	(84,50)	BPKAD			
5	02	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen dan laporan sebagai bahan tanggapan pemeriksaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen dan laporan sebagai bahan tanggapan pemeriksaan perangkat daerah	Dokumen	10	10	3.000.000	0	(3.000.000)	(100)	BPKAD			
5	02	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran BPKAD yang tersusun	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran BPKAD yang tersusun	Laporan	39	39	3.000.000	0	(3.000.000)	(100)	BPKAD			
5	02	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analissi Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Prognosis Perangkat Daerah	Laporan	1	1	3.000.000	0	(3.000.000)	(100)	BPKAD			
5	02	01	2	03	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Administrasi Penatausahaan BMD	Tersedianya Dokumen Administrasi Penatausahaan BMD	Dokumen	1	1	5.000.000	0	(5.000.000)	(100)	BPKAD			
5	02	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	- Jumlah Laporan Bulanan BMD ,Triwulanan, Semesteran dan Laporan Rekonsiliasi BMD SKPD	- Jumlah Laporan Bulanan BMD ,Triwulanan, Semesteran dan Laporan Rekonsiliasi BMD SKPD	laporan	17	17	5.000.000	0	(5.000.000)	(100)	BPKAD			
5	02	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM	Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM	Jenis	1	1	200.000.000	73.301.000	(126.699.000)	(63,35)	BPKAD			

5	02	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah ASN yang mengikuti Bintek/Seminar/Workshop/Diklat	- Jumlah ASN yang mengikuti Bintek/Seminar/Workshop/Diklat	Orang	60	60	200.000.000	73.301.000	(126.699.000)	(63,35)	BPKAD	
5	02	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah	Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah	Jenis	10	10	440.500.000	327.710.902	(112.789.098)	(25,60)	BPKAD	
5	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Perbaikan Instalasi Listrik dan Pembelian Alat Penerangan yang terlaksana selama setahun	Jumlah Kegiatan Perbaikan Instalasi Listrik dan Pembelian Alat Penerangan yang terlaksana selama setahun	kegiatan	12	12	7.500.000	2.346.000	(5.154.000)	(68,72)	BPKAD	
5	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana selama setahun	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terlaksana selama setahun	Unit	5	0	10.000.000	0	(10.000.000)	(100)	BPKAD	
5	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli	Jenis	10	0	5.000.000	0	(5.000.000)	(100)	BPKAD	
5	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor, Makanan dan Minuman harian/kegiatan yang tersedia	Jumlah alat tulis kantor, Makanan dan Minuman harian/kegiatan yang tersedia	Jenis	32	32	60.752.000	59.862.902	(889.098)	(1,46)	BPKAD	
5	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia selama setahun	Jumlah barang cetakan yang tersedia selama setahun	Jenis	11	11	50.000.000	25.205.000	(24.795.000)	(49,59)	BPKAD	
5	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terlaksana selama setahun	Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terlaksana selama setahun	Kegiatan	12	12	15.000.000	10.000.000	(5.000.000)	(33,33)	BPKAD	
5	02	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pembelian Bendera dan umbul umbul	Jumlah Pembelian Bendera dan umbul umbul	Buah	50	50	5.000.000	2.600.000	(2.400.000)	(48,00)	BPKAD	

5	02	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah jenis Penyediaan Makanan dan Minuman rapat dan Makan Minum Tamu yang terlaksana selama setahun	- Jumlah jenis Penyediaan Makanan dan Minuman rapat dan Makan Minum Tamu yang terlaksana selama setahun	Jenis	2	2	79.248.000	48.000.000	(31.248.000)	(39,43)	BPKAD	
5	02	01	2	06	09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah yang terlaksana dalam rangka koordinasi dan konsultasi selama setahun	- Jumlah kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah yang terlaksana dalam rangka koordinasi dan konsultasi selama setahun	kegiatan	50	50	200.000.000	171.697.000	(28.303.000)	(14,15)	BPKAD	
5	02	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah Jasa Penataan Arsip	- Jumlah Jasa Penataan Arsip	Orang	8	8	8.000.000	8.000.000	0	0	BPKAD	
5	02	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya pengadaan BMD sesuai ketentuan	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai ketentuan	Jenis	6	6	3.540.000.000	1.543.290.000	(1.006.710.000)	(56,40)	BPKAD	
5	02	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Pengadaan Mobil untuk Operasional pejabat pada Perangkat Daerah	- Jumlah Pengadaan Mobil untuk Operasional pejabat pada Perangkat Daerah	Unit	6	2	2.407.230.000	1.014.263.000	(1.392.967.000)	(57,87)	BPKAD	
5	02	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Unit	3	1	942.770.000	509.027.000	(433.743.000)	(46,01)	BPKAD	
5	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	- Jumlah Pengadaan Meubeleur selama setahun	- Jumlah Pengadaan Meubeleur selama setahun	Unit	3	0	10.000.000	0	(10.000.000)	(100)	BPKAD	
5	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	- Jumlah Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Unit	9	9	150.000.000	20.000.000	(130.000.000)	(86,67)	BPKAD	

5	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor selama setahun	- Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor selama setahun	Unit	3	0	25.000.000	0	(25.000.000)	(100)	BPKAD	
5	02	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang terlaksana selama setahun	- Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang terlaksana selama setahun	buah	10	0	5.000.000	0	(5.000.000)	(100)	BPKAD	
5	02	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa yang menunjang operasional Perangkat Daerah	Tersedianya jasa yang menunjang operasional Perangkat Daerah	Jenis	4	4	871.500.000	871.925.000	425.000	(0,05)	BPKAD	
5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	- Jumlah surat masuk, surat keluar, nota dinas dan dokumen surat menyurat lainnya yang tercatat dan terdistribusi secara tertib selama setahun	- Jumlah surat masuk, surat keluar, nota dinas dan dokumen surat menyurat lainnya yang tercatat dan terdistribusi secara tertib selama setahun	Surat/ Nodin	7.800	7.800	18.000.000	12.960.000	(5.040.000)	(28,00)	BPKAD	
5	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah kebutuhan Air, Telephone, Listrik, Internet dan Cloud selama setahun	- Jumlah kebutuhan Air, Telephone, Listrik, Internet dan Cloud selama setahun	Jenis	4	4	660.000.000	660.000.000	0	0	BPKAD	
5	02	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama setahun	- Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama setahun	Unit	30	30	25.000.000	10.000.000	(15.000.000)	(60,00)	BPKAD	
5	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (K3 dan alat alat kebersihan) yang tersedia selama setahun	- Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (K3 dan alat alat kebersihan) yang tersedia selama setahun	Orang	4	4	168.500.000	188.965.000	20.465.000	12,15	BPKAD	

5	02	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	Jenis	7	7	288.000.000	141.643.500	(146.356.500)	(50,82)	BPKAD
5	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 perorangan dan jabatan milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya	- Jumlah STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 perorangan dan jabatan milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya	Unit	50	50	15.000.000	11.000.000	(4.000.000)	(26,67)	BPKAD
5	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	- Jumlah STNK Kendaraan Operasional Dinas Roda milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya	- Jumlah STNK Kendaraan Operasional Dinas Roda milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya	Unit	3	3	3.000.000	2.700.000	(300.000)	(10,00)	BPKAD
5	02	01	2	09	05	Pemeliharaan Meubeleur	- Jumlah Meubeleur yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	- Jumlah Meubeleur yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	Unit	5	1	5.000.000	365.000	(4.635.000)	(92,70)	BPKAD
5	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	Unit	30	30	25.000.000	7.300.000	(17.700.000)	(70,80)	BPKAD
5	02	01	2	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	- Jumlah Mobil Operasional dan Mobil Jabatan yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	- Jumlah Mobil Operasional dan Mobil Jabatan yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	Unit	53	53	110.000.000	81.120.000	(28.880.000)	(26,25)	BPKAD

5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	- Jumlah Gedung Kantor yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	Loakl	2	2	100.000.000	4.790.000	(95.005.000)	(95,21)	BPKAD	
5	02	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	Jumlah peralatan gedung kantor yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	Unit	15	15	25.000.000	33.817.500	8.817.500	35,27	BPKAD	
5	02	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan perlengkapan gedung kantor yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	Jumlah kegiatan perlengkapan gedung kantor yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	Kegiatan	12	12	5.000.000	551.000	(4.449.000)	(88,98)	BPKAD	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai Ketentuan	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai Ketentuan	%	100	100	528.183.140.000	513.121.607.000	(15.061.533.000)	(2,85)	BPKAD		
						Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	%	60	60							
						Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	%	100	100							
						Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Ketentuan	Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Ketentuan	%	100	100							
						Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan	%	100	100							

5	02	02	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jenis	15	15	1.610.000.000	561.850.000	(1.075.150.000)	(66,78)	BPKAD	
5	02	02	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS	Dokumen	1	1	200.000.000	101.639.500	(98.360.500)	(49,18)	BPKAD	
5	02	02	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS	Dokumen	1	1	50.000.000	32.210.500	(17.789.500)	(35,58)	BPKAD	
5	02	02	2	01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang diverifikasi	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	5.000	5.000	25.000.000	9.600.000	(15.400.000)	(61,60)	BPKAD	
5	02	02	2	01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	5.000	5.000	25.000.000	9.600.000	(15.400.000)	(61,60)	BPKAD	
5	02	02	2	01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	5000	5.000	100.000.000	23.366.000	(76.634.000)	(76,63)	BPKAD	
5	02	02	2	01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	5000	5.000	100.000.000	22.221.000	(77.779.000)	(77,78)	BPKAD	
5	02	02	2	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	Jumlah Raperda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun	Jumlah Raperda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun	Dokumen	2	2	435.000.000	185.136.000	(249.864.000)	(57,44)	BPKAD	

5	02	02	2	02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah - Jumlah Laporan Mutasi Deposito - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Jasa Giro dan Bunga Deposito	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah - Jumlah Laporan Mutasi Deposito - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Jasa Giro dan Bunga Deposito	Laporan	48	48	156.566.000	98.137.500	(58.428.500)	(37,32)	BPKAD	
5	02	02	2	02	03	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan anggaran Kas dan SPD	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas perangkat daerah yang diterbitkan selama setahun (150 SPD, 150 Anggaran Kas)	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas perangkat daerah yang diterbitkan selama setahun (150 SPD, 150 Anggaran Kas)	Dokumen	300	300	30.000.000	0	(30.000.000)	(100)	BPKAD	
5	02	02	2	02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Jumlah Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) yang disusun - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi yang disusun - Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dana TPG - Jumlah Laporan Realisasi DAK Fisik (12 LKT, 4 BA Rekon Bagi Hasil Pajak Prop, 4 Laporan Rekon TPG, 12 Laporan Realisasi DAK Fisik)	- Jumlah Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) yang disusun - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi yang disusun - Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dana TPG - Jumlah Laporan Realisasi DAK Fisik (12 LKT, 4 BA Rekon Bagi Hasil Pajak Prop, 4 Laporan Rekon TPG, 12 Laporan Realisasi DAK Fisik)	Laporan	32	32	45.000.000	0	(45.000.000)	(100)	BPKAD	
5	02	02	2	02	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe	- Jumlah Laporan Posisi Kas - Jumlah SP2D yang diterbitkan - Jumlah Dokumen SKPP yang diterbitkan (240 Lap Poskas, 5.000 SP2D, 500	- Jumlah Laporan Posisi Kas - Jumlah SP2D yang diterbitkan - Jumlah Dokumen SKPP yang diterbitkan (240 Lap Poskas, 5.000 SP2D, 500	Dokumen	5740	5740	294.584.000	93.441.500	(201.142.500)	(68,28)	BPKAD	

						motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	SKPP)	SKPP)											
5	02	02	2	02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan instansi terkait	- Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PPKD - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran BPKAD - Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	- Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PPKD - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran BPKAD - Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	Dokumen	72	72	15.000.000	0	(15.000.000)	(100)	BPKAD			
5	02	02	2	02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD yang tersusun selama setahun	Jumlah perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD yang tersusun selama setahun	Perbup	1	1	90.000.000	60.275.000	(29.725.000)	(33,03)	BPKAD			
5	02	02	2	02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah personil pengelola keuangan pada perangkat daerah yang mengikuti Pembinaan/Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah	- Jumlah personil pengelola keuangan pada perangkat daerah yang mengikuti Pembinaan/Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang	75	75	73.850.000	52.000.000	(21.850.000)	(29,59)	BPKAD			
5	02	02	2	03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Terlaksananya Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jenis	11	11	715.000.000	247.835.000	(467.165.000)	(65,34)	BPKAD			
5	02	02	2	03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD dan PPKD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD dan PPKD	Laporan	48	48	30.000.000	10.835.000	(19.165.000)	(63,88)	BPKAD			

5	02	02	2	03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda	- Jumlah Manual Book dan Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi	- Jumlah Manual Book dan Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi	Dokumen	2	0	50.000.000	0	(50.000.000)	(100)	BPKAD	
5	02	02	2	04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tersalurkannya Bantuan Keuangan, Bantuan Korban Bencana dan Bagi Hasil kepada Masyarakat	Persentase Tersalurkannya Bantuan Keuangan, Bantuan Korban Bencana dan Bagi Hasil kepada Masyarakat	%	90	90	524.923.140.000	512.691.465.000	(12.231.675.000)	(2,33)	BPKAD	
5	02	02	2	04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang menerima Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang menerima Bantuan Keuangan	Desa	211	211	494.571.067.000	487.771.067.000	(6.800.000.000)	(1,37)	BPKAD	
5	02	02	2	04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Proses Penyaluran Belanja Tidak Terduga	Jumlah Proses Penyaluran Belanja Tidak Terduga	Dokumen	50	50	20.000.000.000	13.500.000.000	(6.500.000.000)	(32,50)	BPKAD	
5	02	02	2	04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang menerima Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Desa yang menerima Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Desa	211	211	10.352.073.000	11.420.398.000	1.068.325.000	10,32	BPKAD	
5	02	02	2	05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi yang mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi yang mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah	Jenis	2	2	230.000.000	37.110.000	(192.890.000)	(83,87)	BPKAD	
5	02	02	2	05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dibuat dan dipelihara	Jumlah Sistem Informasi yang dibuat dan dipelihara	Sistem	2	2	80.000.000	37.110.000	(42.890.000)	(53,61)	BPKAD	
5	02	02	2	05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang mengikuti Bimtek operasional sistem penyusunan Laporan Keuangan (SIMDA)	Jumlah Personil yang mengikuti Bimtek operasional sistem penyusunan Laporan Keuangan (SIMDA)	Orang	75	0	150.000.000	0	(150.000.000)	(100)	BPKAD	

5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BMD			Presentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Presentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100	100	9.470.000.000	884.920.000	(8.585.080.000)	(90,66)	BPKAD		
5	02	03	2	01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	Dokumen	8	8	9.470.000.000	884.920.000	(8.585.080.000)	(90,66)	BPKAD		
5	02	03	2	01	03	Penyusunan perencanaan kebutuhan BMD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBM yang tersusun selama setahun	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBM yang tersusun selama setahun	dokumen	2	2	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)	(66,67)	BPKAD	
5	02	03	2	01	05	Penatausahaan BMD	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pengguna BMD dan Pengurus BMD	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pengguna BMD dan Pengurus BMD	Dokumen	4	4	15.000.000	0	(15.000.000)	(100)	BPKAD	
5	02	03	2	01	07	Pengamanan BMD	- Jumlah Tanah Milik Pemda yang terproses sertifikatnya - Jumlah Tanah Pemda yang terpasangi Papan Identitas Tanah Pemda (200 sertifikat, 100 papan)	- Jumlah Tanah Milik Pemda yang terproses sertifikatnya - Jumlah Tanah Pemda yang terpasangi Papan Identitas Tanah Pemda (200 sertifikat, 100 papan)	Bidang	300	300	710.000.000	654.000.000	(56.000.000)	(7,89)	BPKAD	
5	02	03	2	01	08	Penilaian BMD	Jumlah Aset yang dinilai	Jumlah Aset yang dinilai	Unit	10	10	50.000.000	0	(50.000.000)	(100)	BPKAD	
5	02	03	2	01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian	Lpaoran	2	2	25.000.000	11.000.000	(14.000.000)	(56,0)	BPKAD	
5	02	03	2	01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	- Jumlah alat berat dan kendaraan dinas roda empat yang dijamin selama setahun - Jumlah Laporan Pemindahtanganan dan Penghapusan	- Jumlah alat berat dan kendaraan dinas roda empat yang dijamin selama setahun - Jumlah Laporan Pemindahtanganan dan Penghapusan	Unit, laporan, SPT, paket, lokasi	155 Unit, 4 Laporan, 75 SPT, 1 paket, 51 lokasi	155 Unit, 4 Laporan, 75 SPT, 1 paket, 51 lokasi	8.500.000.000	189.320.000	(8.310.680.000)	(97,77)	BPKAD	

							- Jumlah Laporan Monitoring Pemanfaatan BMD - Jumlah SPT PBB tanah milik Pemkab yang terbayar - Jumlah Pengadaan Tanah - - Jumlah Aset yang telah dimanfaatkan	- Jumlah Laporan Monitoring Pemanfaatan BMD - Jumlah SPT PBB tanah milik Pemkab yang terbayar - Jumlah Pengadaan Tanah - - Jumlah Aset yang telah dimanfaatkan										
5	02	03	2	01	12	Penyusunan Laporan BMD	- Jumlah Laporan BMD Akhir Tahun Konsolidasi - - Jumlah Laporan Semesteran BMD Konsolidasi - Jumlah Laporan Bulan dan Triwulanan BMD Konsolidasi	- Jumlah Laporan BMD Akhir Tahun Konsolidasi - - Jumlah Laporan Semesteran BMD Konsolidasi - Jumlah Laporan Bulan dan Triwulanan BMD Konsolidasi	Laporan	14	14	40.000.000	20.600.000	-	(48,50)	BPKAD		
5	02	03	2	01	13	Pembinaan Pengelolaan BMD	- Jumlah personil yang mengikuti Sosialisasi/Bimtek pengelola BMD	- Jumlah personil yang mengikuti Sosialisasi/Bimtek pengelola BMD	Orang	75 Orang	0	100.000.000	0	(100.000.000)	(100)	BPKAD		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya Refocusing terdapat 23 Sub Kegiatan dari total 83 Sub Kegiatan yang anggarannya ditiadakan atau di hilangkan yaitu diantaranya :

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan;
3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
5. Penyusunan Pelaporan dan Analissi Prognosis Realisasi Anggaran;
6. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD;
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
9. Pengadaan Mebel;
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
12. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan;
13. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
14. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan;
15. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan anggaran Kas dan SPD;
17. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
18. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta; Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan instansi terkait;
19. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda;
20. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda;
21. Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
22. Penatausahaan BMD;
23. Penilaian BMD.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ini merupakan pedoman bagi BPKAD dalam melaksanakan program kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun dengan berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan langkah- langkah dalam penyesuaian terhadap kegiatan yang mengalami perubahan anggaran dan mengakomodir kegiatan krusial sebagai bentuk dalam salah satu upaya untuk menangani bencana Pandemi Covid -19 yang terjadi di Kabupaten Pemalang.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan langkah-langkah lanjutan terhadap Renja tahun berjalan dengan harapan dapat tercapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra maupun SAKIP.

Dengan adanya penyesuaian Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021, diharapkan BPKAD lebih maksimal dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pemalang 2016-2021 dengan pelaksanaan kegiatan yang lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan.

Pemalang, 23 September 2021

Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang



Drs.M.A.PUNTODEWO, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19640327 199201 1 002